**RINGKASAN**

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS**

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA**

**2021-2022**

Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2021-2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas kinerja DPD RI selama satu tahun sejak September 2021 Hingga Agustus 2022, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja DPD RI pada tahun sidang berikutnya sehingga dapat memberikan kepada masyarakat dan daerah gambaran kinerja lembaga DPD RI. Melalui laporan ini, DPD RI ingin mensosialisasikan pelaksanaan tugas DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah di tingkat pusat.

Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 2021-2022 menyajikan data tentang kinerja alat kelengkapan yang ada di DPD RI yang dibagi menjadi 8 bab yang dibuat berdasarkan tugas dan fungsi DPD RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi pertimbangan anggaran dan pelaksanaan fungsi lain dalam penguatan kelembagaan.

Selanjutnya, pada Bab 1 membahas tentang Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang tujuan awal dibuat laporan Buku Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode tahun 2021-2022. Kemudian pada Bab II Tentang DPD RI dibagi menjadi 4 sub-bab yaitu pertama membahas tentang Pembentukan DPD RI dimana dijelaskan tentang sejarah pembentukan DPD RI hingga dinamika kelembagaan dari tahun 2004 hingga saat ini. Kedua, Tugas dan Wewenang DPD RI menjelaskan tugas, fungsi dan wewenang DPD RI yang terbagi atas alat kelengkapan. Ketiga, Pimpinan dan Anggota DPD RI menjelaskan komposisi dan profil pimpinan dan anggota DPD RI periodew 2019-2024. Keempat, Alat Kelengkapan DPD RI menjelaskan profil dan tugas alat kelengkapan DPD RI.

Pada Bab III Pelaksanaan Fungsi Legislasi menjelaskan tentang pelaksanaan penyusunan naskah RUU di alat kelengkapan Komite I s.d IV. Pada Bab ini disertakan juga foto kegiatan masing-masing alat kelengkapan. Pada Bab ini juga dibahas tentang Program Legislasi Nasional DPD RI, Rancangan Undang-Undang Dari DPD RI dan Pandangan/Pendapat dan Pertimbangan DPD RI.

Selanjutnya pada Bab IV Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Atas Pelaksanaan Undang-Undang membahas tentang kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang oleh alat kelengkapan di Komite I s.d IV yang disertakan foto kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang oleh komite. Pada Bab V Pelaksanaan Fungsi Pertimbangan Anggaran membahas tentang kegiatan Komite IV dalam memberikan pertimbangan anggaran dalam bentuk Pertimbangan atas Haspsem BPK RI dan Pemilihan Anggota BPK RI.

Kemudian pada Bab VI Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas DPD Dalam Kerangka Fungsi Representasi, membahas kegiatan pengelolaan aspirasi masyarakat daerah atau asmasda oleh Puskadaran dalam bentuk grafik dan data selama satu tahun sidang. Selanjutnya pada Bab VII Pelaksanaan Fungsi Lain Dalam Penguatan Kelembagaan berupa Implementasi Amanat Undang-Undang, Penegakan Kode Etik, Kerjasama Lembaga dan Hubungan Luar Negeri, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Yang Berindikasi Kerugian Negara dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat, Kerumahtanggaan dan Anggaran DPD RI, Penataan Sistem Ketatanegaraan, Dinamika Kelembagaan DPD RI, Panitia Khusus (Pansus), Penguatan Sistem Pendukung DPD RI. Terakhir pada BAB VIII PENUTUP membahas rangkuman singkat dan harapan kedepan.